

BAB II
KAJIAN PUSTAKA
PROBLEMATIKA PELAKSANAAN ADMINISTRASI MADRASAH
(STUDI KASUS DI MA NURUL QUR'AN TEGALWERO PUCAKWANGI
PATI TAHUN PELAJARAN 2015/2016)

A. Administrasi Madrasah

1. Pengertian Administrasi Madrasah

Administrasi merupakan suatu tindakan yang harus dikelola dan dilakukan dengan baik. Belajar dan memahami administrasi madrasah secara keseluruhan, maka perlu terlebih dahulu membahas titik awal penegeritian tersebut, yaitu administrasi. Administrasi merupakan awal dari sebuah lembaga dalam mencapai keberhasilannya administrasi juga menjadi bagian dalam penentu keberhasilan madrasah didalam manajemennya.

Pengertian dasar tentang administrasi itu akan merupaka tumpukan pemahaman administrasi pendidikan seutuhnya. Secara sederhana administrasi ini berasal darai kata latin “ad” dan “ministro”. Ad mempunyai arti ‘kepada” dan ministro berarti ‘melayani”.Secara bebas dapat diartikan bahwa administrasi itu merupakan pelayanan atau pengabdian terhadap subjek tertentu. Memang, zaman dahulu administrasi dikenakan kepada pekerjaan yang berkaitan dengan pengadian atau pelayanan kepada raja atau materi-materi dalam tugas mengelola pemerintahannya.¹

Menurut Simon (1987), administrasi dapat ditafsirkan sebagai seni untuk menyelesaikan sesuatu. Selanjutnya, ia mengatakan bahwa kegiatan administrasi tekanannya diletakkan pada proses dan metode untuk menjamin adanya suatu tindakan yang tepat.² Admnistrasi merupakan proses yang harus dilakukan dalam proses pengelolaan madrasah atau

¹ M. Daryanto, *Administrasi Pendidikan*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1998, hlm. 1-2.

²Tim Penyusun, *Evaluasi Diri Sekolah (EDS), Rencana Kerja Sekolah (RKS), dan Reencana Pengembangan Sekolah (RPS)*, PT Binatama Raya, Jakarta, 2011, hlm. 866.

sekolah dengan menggunakan metode atau cara yang efektif sehingga dalam mengatur administrasi dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan hasil yang memuaskan. Administrasi tidak dapat hanya dijalankan oleh individual tetapi harus dijalankan bersama dengan tujuan yang sama.

Kini administrasi itu telah mengalami perkembangan yang pesat sehingga administrasi ini mempunyai pengertian atau konotasi yang luas. Secara garis besarnya pengertian itu antara lain sebagai berikut: 1. Mempunyai pengertian sama dengan manajemen, 2. Menyuruh orang agar bekerja secara produktif, 3. Memanfaatkan manusia, material, uang, metode secara terpadu.

Fungsi eksekutif pemerintah bahkan banyak orang yang beranggapan bahwa administrasi itu sama dengan pekerjaan juru tulis, klerk, tata usaha, kerja kantor, atau pekerjaan yang bersangkutan paut alat tulis menulis.³ Seperti halnya pengertian mendasar tentang administrasi bahwa administrasi merupakan kegiatan-kegiatan yang didalamnya berisi tentang cara untuk mengatur, menata, mengorganisir dan mempersiapkan. Kegiatan administrasi ini sangat identik dengan kegiatan mengolah data juga disamping yang telah disebutkan tersebut.

Selanjutnya untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang pengertian administrasi, baiklah kita kemukakan disini beberapa rumusan mengenai administrasi oleh para ahli sebagai berikut :

1) Sondang P. Siagian, Mpa. Phd

Administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang di dasarkan atas rasionalitas tetentu, untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Administrasi merupakan pekerjaan yang tidak bisa dilakukan hanya satu orang saja tetapi perlu adanya kerja sama didalamnya.

2) Ars. The Liang Gie, dalam *pengertian, kedudukan dan ilmu Administrasi* megatakan:

³ M. Daryanto, *Administrasi Pendidikan*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1998, hlm. 1-2.

Administrasi sekolah adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilaksanakan oleh sekelompok orang dalam bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Admisnistrasi merupakan pekerjaan dan kegiatan disekolah yang harus dilakukan oleh sekelompok orang dengan tujuan yang sama sesuai dengan aturan yang berlaku di madrasah tersebut.

3) Drs. Soehari Trisna, dalam segi-segi *Administrasi Sekolah*.

Administrasi adalah keseluruhan proses penyelenggaraan dalam usaha kerja sama dua orang atau lebih dengan secara rasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya secara efisien. Administrasi tidak dapat berjalan secara efektif dan efesien ketika hanya dilakukan hanya satu orang saja. Administrasi ini perlu adanya dukungan-dukungan antar anggota agar dalam pelaksanaan administrasi dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan kepuasan dalam sebuah organisasi.

Melihat rumusan-rumusan tersebut di atas, jelaslah kiranya bahwa administrasi pendidikan meliputi berbagai aspek dan kegiatan yang kesemuanya ditujukan untuk mencapai tujuan pendidikan yang dicita-citakan. Perlu diketahui, bahwa rumusan-rumusan tersebut tidak dapat dipisah-pisahkan satu dengan yang lain, melainkan saling berhubungan erat dan saling melengkapi. Hanya saja tekanan dari masing-masing rumusan itu berbeda-beda.⁴ Administrasi tidak akan berjalan dengan efektif apabila dalam melaksanakannya tidak menyangkut satu dengan yang lain. Administrasi dapat berjalan dengan baik apabila dilakukan secara bersama-sama dan saling mengisi satu dengan yang lain. Kegiatan-kegiatan dalam pengelolaan administrasi harus menyesuaikan dengan visi dan misi madrasah agar pelaksanaannya sesuai dengan tujuan bersama baik itu pendidik maupun tenaga kependidikan. Maka untuk menunjang keberhasilan dalam manajemen harus ada tujuan yang sama dan sejalan.

⁴M. Daryanto, *Op. Cit.*, hlm. 3-4.

2. Prinsip-prinsip Administrasi Madrasah

Administrasi akan berhasil baik apabila didasarkan atas dasar-dasar yang tepat. Dasar diartikan sebagai suatu kebenaran yang fundamental yang dapat dipergunakan sebagai landasan dan pedoman bertindak dalam kehidupan bermasyarakat. Berikut ini akan dipaparkan beberapa dasar yang perlu diperhatikan adgar administrator dapat mencapai sukses dalam tugasnya. Terdapat banyak dasar administrasi, abatara lain, 1. *Prinsip Efisiensi*, seorang administrasi akan berhasil dalam tugasnya bilaman dia efisiensi dalam menggunakan semua sumber tenaga dana dan fasilitas yang ada 2. *Prinsip pengelolaan*, administrator akan memperoleh hasil yang paling efektif dan efisien melalui orang-orang lain dengan melakukan pekerjaan manajemen, yakni merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan dan mengontrol,

3. *Prinsip Penguatan tugas pengelolaan*, jika disertai pekerjaan manajemen dan operatif dalam waktu yang sama , sesorang administrator cenderung untuk memberikan prioritas pertama pada pekerjaan yang operatif, 4. *Prinsip Kepemimpinan yang Efektif*, seorang administrator yang berhasil dalam tugasnya apabila ia menggunakan gaya kepemimpinan yang efektif, yakni yang memperhatikan dimensi-dimensi hubungan antar manusia (*human relationship*), dimensi pelaksanaan tugas dan dimensi situasi dan kondisi yang ada, 4. *Prinsip Kerjasama*, seorang administrator akan berhasil baik dalam tugasnya bila ia mampu mengembangkan kerjasama di antara orang-orang yang terlibat, baik secara horizontal maupun secara vertikal.⁵

Pelaksanaan administrasi di madrasah akan berjalan efektif dan menghasilkan layanan yang diharapkan secara bersama dengan menjalankan lima prinsip diatas. Administrasi menjadi tumpuan akan mutu dan tidaknya sekkolah atau madrasah dalam rangka

⁵ M. Daryanto, *Administrasi Pendidikan*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1998, hlm. 12-14.

mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidik dan tenaga kependidikan harus memperhatikan prinsip-prinsip dalam pelaksanaan administrasi.

3. Unsur-unsur Administrasi Madrasah

Beberapa definisi administrasi pendidikan yang telah dikemukakan di atas ternyata bahwa di dalam setiap kegiatan administrasi terdapat beberapa unsur yang selalu kait-mengait satu sama lain. Kegiatan administrasi tidak hanya mengedepankan prinsip-prinsip dan sistem dalam mengaturnya tetapi juga membutuhkan unsure-unsur didalamnya agar dalam pengelolaanya dapat seimbang dengan rencana yang dibentuk. Administrasi merupakan kegiatan yang tidak dapat dipisah-pisahkan antara satu unsure dengan unsure yang lain khususnya dalam pelaksanaan administrasi yang ada dilembga madrasah.

Madrasah merupakan lembaga yang mempunyai beberapa unsur seperti adanya kepala madrasah, waka kurikulum, waka kesiswaan, waka human, waka sarana dan prasarana, dan lain sebagainya. Melihat dari beberapa unsur-unsur yang ada didalam lembaga madrasah maka semuanya harus mempunyai progam-progam yang dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan administrasi madrasah. Semua unsur-unsur seperti yang disebutkan diatas harus mempunyai tujuan dan rencana dalam peningkatan pelaksanaan administrasi di madrasah supaya output yang dikeluarkan oleh madrasah tidak hanya manfaat bagi lingkungan madrasah saja tetapi juga bermanfaat dilingkungan sekitar khususnya masyarakat.

Beberapa unsur pokok dalam administrasi yang dimaksud ialah:

1. Adanya sekelompok manusia (sedikitnya dua orang),
2. Adanya tujuan yang hendak di capai bersama,
3. Adanya tugas/fungsi yang harus dilaksanakan (kegiatan kerja sama),
4. Adanya peralatan dan perlengkapan yang diperlukan.

Semua unsur tersebut harus diatur dan dikelola sedemikian rupa sehingga mengarah kepada tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditentukan.⁶ Kegiatan administrasi di madrasah perlu adanya unsur kerja sama antar sesama pendidik dan tenaga kependidikan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah dibentuk bersama. Pendidik tidak hanya menjalankan tugasnya sebagai pendidik tetapi juga harus berperan aktif dalam kegiatan administrasi. Disamping adanya pelaku dalam pelaksanaan administrasi madrasah sarana dan prasarana di madrasah harus mencukupi apa yang akan digunakan oleh pendidik dan tenaga kependidikan.

4. Tujuan Administrasi Madrasah

Pelaksanaan kegiatan administrasi baik secara individu maupun kelompok organisasi berkaitan dengan tujuan organisasi khususnya di madrasah. Agar tujuan dapat tercapai secara efektif maka dilakukan efisiensi kerja. Berbicara masalah efisiensi kerja tentunya berkaitan dengan pengaturan atau tata kelola administrasi yang dalam hal ini adalah tata kelola administrasi sekolah. Kegiatan administrasi madrasah meliputi proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya organisasi.

Keempat komponen tersebut merupakan suatu sistem yang terpadu, yakni antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan secara utuh. Artinya, perencanaan harus diorganisasikan, diarahkan, dan dikendalikan. Berdasarkan ilustrasi diatas maka dapat dirumuskan tujuan administrasi madrasah sebagai berikut: 1. Memberi arah dalam penyelenggaraan madrasah, 2. Memberikan umpan balik bagi perbaikan proses dan hasil pendidikan di madrasah, 3. Meningkatkan mutu penyelenggaraan administrasi madrasah, 4. Menuju tertib administrasi, 5. Mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran, yang aktif, inovasi, kreatif, efektif dan menyenangkan (PAIKEM), f.

⁶M. Ngalim Purwanto, *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*, Rosdakarya, Bandung Cet.Ke- 12, hlm. 5.

Menunjang tercapainya program sekolah secara efektif dan efisien.⁷

Seperti disebutkan dalam defenisi di atas, tujuan administrasi madrasah adalah untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Tujuan yang telah ditentukan ini tidak lain ialah tujuan lembaga atau badan usaha. Tujuan ini berupa suatu hasil, produk, ataupun output. Oleh karena itu tujuan ini disebut juga tujuanyang berorientasi kepada hasil (*production oriented*). Di samping tujuan yang berupahasil tersebut, dalam administrasi guru masih ada tujuan lain yang ingin di capai. Tujuan itu berorientasi pada manusia (kemanusiaan) atau personil. Oleh karena itu,tujuan ini di sebut juga tujuan yang berorientasi pada manusia atau pekerja (*peopleorieted*).⁸

Uraian-uraian terdahulu jelaslah bahwa administrasi pendidikan atau sekolah maupun madrasah tidak hanya menyangkut soal-soal tata usaha sekolah, tetapi menyangkut semua kegiatan sekolah atau madrasah, baik yang mengenai materi, personal, perencanaan, kerja sama, kepemimpinan, kurikulum, dan sebagainya, yang harus diatur sehingga menciptakan suasana yang memungkinkan terselenggaranya kondisi-kondisi belajar mengajar yang baik sehingga mencapai tujuan pendidikan.

Melaksanakan pekerjaan yang sedemikian kompleks dan banyak seginya itu, diperlukan orang-orang yang cakap dan memiliki pengertian yang luas tentang pelaksanaan dan tujuan sekolah atau madrasah itu, dan hubungan antara segi-segi yang satu dengan segi yang lain. Untuk itu pula maka diperlukan adanya pimpinan sekolah atau madrasah yang memiliki syarat-syarat yang dituntut di dalam melaksanakan kepemimpinannya.⁹

⁷ *Evaluasi Diri Sekolah (EDS), Rencana Kerja Sekolah (RKS), dan Reencana Pengembangan Sekolah (RPS)*, Op. Cit., hlm. 866-869.

⁸ Syaiful Sagala, *Administrasi Pendidikan Kontemporer*, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm. 21.

⁹ M. Ngalim Purwanto, *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*, Rosdakarya, Bandung Cet.Ke- 12, hlm. 13.

5. Ruang Lingkup Administrasi Madrasah

Bidang-bidang yang tercakup dalam administrasi pendidikan adalah sangat banyak dan luas. Ada hal yang sangat penting dan perlu diketahui oleh para kepala sekolah dan guru-guru pada umumnya ialah sebagai berikut :

- a. Bidang tata usaha sekolah, ini meliputi :
 - (1) Organisasi dan struktur pegawai tata usaha
 - (2) Anggaran belanja keuangan sekolah
 - (3) Masalah kepegawaian dan personalia sekolah
 - (4) Keuangan dan pembukuan
 - (5) Korespondensi/surat menyurat
 - (6) Masalah pengangkatan, pemindahan, penempatan, laporan, pengisian buku,raport dan sebagainya
- b. Bidang personalia murid, yang meliputi anatar lain ;
 - (1)Organisasi murid
 - (2)Masalah kesehatan murid
 - (3)Masalahkesejahteraan murid
 - (4)Evaluasi kemajuan murid
 - (5)Bimbingan dan penyuluhan bagi murid
- c. Bidang personalia guru, meliputi antara lain :
 - (1)Pengangkatan dan penempatan tenaga guru
 - (2)Organisasi personalia guru
 - (3)Masalah kepegawaian
 - (4)Masalah komite dan evaluasi kemajuan guru
 - (5)Refresing dan up-grading guru-guru
- d. Bidang pengawasan (supervise), yang meliputi antara lain :
 - (1) Usaha membangkitkan semangat guru-guru dan pegawai tata usaha dalam menjalankan tugasnya masing-masing sebaik-baiknya.
 - (2) Mengusahakan dan mengembangkan kerjasama yang baik anantara guru, mrid dan pegawai tata usaha sekolah

- (3) Mengusahakan dan membuat pedoman cara-cara menilai hasil-hasil pendidikan dan pengajaran
- (4) Usaha mempertinggi mutu dan pengalaman guru pada umumnya.

Dalam buku “Pedoman Umum Menyelenggarakan Administrasi Sekolah Menengah (1984), disebutkan pula mengenai ruang lingkup kegiatan administrasi sekolah meliputi: (1) Administrasi program pengajaran atau kurikulum, (2) Administrasi murid dan siswa, (3) Administrasi kepegawaiaan, (4) Administrasi keuangan, (5) Administrasi perlengkapan, (6) Administrasi surat menyurat, (7) Administrasi perpustakaan, (8) Administrasi pembinaan kesiswaan, (9) Administrasi hubungan sekolah dengan masyarakat.¹⁰

Administrasi pendidikan khususnya dalam sekolah atau madrasah memiliki beberapa aspek dan bagian untuk dijalankan dan dipenuhi untuk mencapai keberhasilan dalam manajemen pengelolaan administrasi di sekolah dan madrasah. Ruang lingkup ini diharapkan dapat memberikan keberhasilan dalam rangka mengatasi masalah-masalah administrasi yang dihadapi dalam pengelolaan administrasi di madrasah khususnya yang statusnya swasta.

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa *skopa* atau ruang lingkup administrasi pendidikan itu meliputi segala hal yang ada pada dasarnya ditekankan pada pelaksanaan kegiatan/usaha pendidikan supaya berjalan secara teratur dan tertib yang semua itu diorientasikan pada tujuan pendidikan.¹¹ Pelaksanaan administrasi juga tidak lepas dari pengawasan yang dilakukan oleh pengawas sekolah maupun pengawas madrasah yang bertugas sebagai penyelenggara supervisi di madrasah berkaitan dengan jalannya pengelolaan administrasi madrasah.

¹⁰ Ary H. Gunawan, *Administrasi Sekolah “Administrasi Pendidikan Mikro”*, Cet. Pertama, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 7-8.

¹¹M. Daryanto, *Op. Cit.*, hlm. 24-27.

6. Teknik Supervisi Administrasi Madrasah

Administrasi dapat dijalankan dengan efektif dan efisien jika di dalam pelaksanaan mempunyai teknik-teknik yang menjadi pedoman dalam melaksanakan kegiatan administrasi tersebut. Administrasi di madrasah tidak dapat berjalan baik apabila dalam pelaksanaannya tidak ada sosok pimpinan dalam lembaga tersebut yang bertugas untuk menjalankan supervisi madrasah dalam mengatasi masalah-masalah yang dialami oleh bawahannya. Agar pelaksanaan supervisi dapat efektif maka sebaiknya supervisor memahami teknik-teknik supervisi yang antara lain sebagai berikut: 1. Mengetahui cara memulai supervisi, 2. Berusaha memberikan perintah secara tepat arah, 3. Berusaha memperoleh bantuan dari pengikut atau bawahan, 4. Berikhtiyar mengambil keputusan secara akurat, 5. Berusaha memberikan kritik secara humanis, 6. Berikhtiyar menyelesaikan keluhan pengikut, 7. Berusaha mengatasi pengikut yang membuat persoalan, 8. Berusaha mengatasi pelanggaran-pelanggaran serius, 9. Berusaha mengatasi pemborosan, 10. Berikhtiyar melakukan supervisi jarak jauh.

Adapun teknik supervisi administrasi madrasah, selain memperhatikan teknik supervisi di atas, juga perlu diperhatikan bahwa

- a. Supervisi administrasi madrasah dilakukan oleh pengawas sekolah kepada kepala sekolah, pegawai tata usaha, wali kelas, Pembina osis, pengurus osis, dan para koordinator unit sekolah
- b. Supervisi administrasi sekolah dilakukan melalui wawancara dan observasi
- c. Hasil wawancara dan observasi administrasi sekolah direkap untuk kemudian dirumuskan nilai.

Adapun unsur-unsur yang harus ada dalam supervisi administrasi sekolah : a. Nama, b. Aspek-aspek administrasi sekolah, c. Aspek penampilan, c. tes¹²

Pelaksanaan supervise di madrasah tidak hanya berjalan dengan bersumber dari data saja tetapi dari hasil wawancara dengan pengelola madrasah atau yang bersangkutan didalamnya. Penentuan keberhasilan dalam pelaksanaan administrasi harus sesuai dengan standar yang ditentukan oleh peraturan administratif sekolah atau madrasah. Satu langkah dalam pengawasan administrasi madrasah adalah dengan adanya Kepengawasan Manjerial yang dilakukan oleh pengawasan sekolah atau madrasah.

Kepengawasan manajerial atau pengawas manajerial merupakan fungsi supervisi yang berkenaan dengan aspek pengelolaan madrasah yang terkait langsung dengan peningkatan efisiensi dan efektifitas madrasah yang mencakup perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, penilaian, pengembangan, kompetensi sumberdaya tenaga pendidik dan kependidikan.¹³ Kepengawasan atau supervisi memang sangat dibutuhkan dalam dunia pendidikan khususnya dalam lingkup sekolah atau madrasah. Supervisi menjadi teknik yang harus dikuasai dalam rangka merubah tata pengelolaan dalam administrasi supaya dalam melangkah menjalankan kegiatan dapat berjalan dengan baik. Dari keberhasilan yang akan dijamin dalam supervisi tidak hanya lingkup administrasi saja tetapi juga kegiatan belajar dan mengajar dapat teratasi dengan baik dan akan berjalan secara efektif.

7. Prinsip-prinsip Supervisi Administrasi Madrasah

Prinsip-prinsip tentu saja diangkat dari prinsip fundamental yang menggunakan pendekatan ilmiah dalam manajemen. Sejauh ini sejumlah prinsip tersebut yang lebih banyak diilhami oleh prinsip

¹²*Evaluasi Diri Sekolah (EDS), Rencana Kerja Sekolah (RKS), dan Rencana Pengembangan Sekolah (RPS), Op. Cit.*, hlm. 869.

¹³Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, *Pedoman Supervisi Pengawas Madrasah dan Pengawas PAI Pada Sekolah*, Semarang, 2012, hlm. 15

manajemen pada umumnya, namun dengan anggapan bahwa dalam prakteknya dapat diterapkan dalam penyelenggaraan administrasi administrasi. Dalam menuju tingkat produktivitas penyelenggaraan pendidikan, harus di administrasikan dengan berpegang pada prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Menerapkan kembali prosedur dan tehnik yang dilandasi oleh pengetahuan terorganisir.
- b. Mencapai keharmonisan tindakan kelompok, bukan sebaliknya.
- c. Mencapai suasana kerja sama manusia bukan individualisasi yang semrawut.
- d. Bekerja untuk memperoleh out-put semaksimal mungkin.
- e. Mengembangkan para bawahan semaksimal mungkin sesuai dengan segalakemampuan yang ada pada diri dan kemakmuran persatuan mereka sendiri. Menurut kelima prinsip di atas adalah seperangkat pedoman yang dapat dipegang dalam setiap langkah penyelenggaraan administrasi guru agar usaha-usaha pendidikan itu mampu mencapai tingkat produktivitasnya semaksimal mungkin, yang pada gilirannya tujuan pembelajaran itu sendiri dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.¹⁴ Dalam melaksanakan tugasnya seorang supervisor harus berpegang pada prinsip-prinsip yang kokoh demi kesuksesan tugasnya atau memiliki pedoman bagi pelaksanaan tugasnya yaitu:

1) *Prinsip Fundamental/Dasar*

Setiap pemikiran, sikap dan tindakan seorang supervisor harus berdasar dan berlandaskan sesuatu yang kokoh kuat serta dapat dipulangkan kepadanya. Bagi bangsa Indonesia, pancasila adalah dasar dan falsafah Negara kita, sehingga bagi supervisor, pancasila adalah prinsip fundamentalnya. Setiap supervisor pendidikan Indonesia harus bersikap konsisten dan

¹⁴Syaiful Sagala, *Administrasi Pendidikan Kontemporer*, Al Fabeta, Bandung, 2000, hlm. 37-38.

kosekuen dalam pengamalan sila-sila Pancasila secara murni dan konsekuen.

2) *Prinsip Praktis*

Sesuai prinsip fundamental sebagai pedoman seorang supervisor pendidikan Indonesia, maka dalam pelaksanaan sehari-hari mereka berpedoman pada prinsip positif dan prinsip negatif.

a) Prinsip positif merupakan pedoman yang harus dilakukan seorang supervisor agar berhasil dalam pembinaanya.

(1) Supervisi harus dilakukan berdasarkan hubungan profesional, bukan berdasarkan hubungan pribadi/konco.

(2) Supervisi hendaklah dapat mengembangkan potensi, bakat, dan kesanggupan untuk mencapai kemajuan.

b) Prinsip negatif merupakan pedoman yang tidak boleh dilakukan oleh seorang supervisor dalam pelaksanaan supervisi.

(1) Supervisi tidak boleh memaksakan kemauannya (otoriter) kepada orang-orang yang disupervisi. Berikan argumentasi atau alasan yang rasional tentang tindakan-tindakan serta instruksi-instruksinya. Jangan menonjolkan jabatan atau kekuasaannya agar tidak menghambat kreativitas bawahannya.

(2) Supervisi hendaklah tidak menutup kemungkinan terhadap perkembangan dan hasrat untuk maju bagi bawahannya dengan dalih apapun. Supervisi tidak boleh cepat mengharapkan hasil, mendesak dan memperkuda bawahan.¹⁵

¹⁵ Ary H. Gunawan, *Administrasi Sekolah "Administrasi Pendidikan Mikro"*, Cet. Pertama, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 196-197.

8. Fungsi-fungsi Administrasi Sekolah

Semua kegiatan sekolah akan dapat berjalan lancar dan berhasil baik jika pelaksanaannya melalui proses-proses yang menurut garis fungsi-fungsi administrasi sekolah tersebut. yang mana fungsi-fungsi tersebut adalah:

a. Perencanaan

Fungsi perencanaan administrasi madrasah ialah untuk mendapatkan calon tenaga pengajar yang memang dibutuhkan. Perencanaan merupakan proses awal dalam pelaksanaan untuk itu lembaga mampu merencanakan kebutuhan dimasa yang akandatang guna mendapatkan kebutuhan yang diperlukan dan guna mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Jadi dengan adanya perencanaan yang terarah dan sistematis pelaksanaan kegiatan akan berjalan lancar.

b. Seleksi

Fungsi seleksi administrasi ialah penyeleksian calon tenaga pengajar untuk direkrut atau diambil atas kebutuhan pada lembaga tersebut, yang mana penyeleksian juga harus dapat disesuaikan dengan persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan oleh lembaga misalnya : persyaratan administrasi, ujian (tes), dan wawancara dan persyaratan lainnya.

c. Pengangkatan atau Penempatan

Fungsi pengangkatan dan penempatan administrasi madrasah adalah mengangkat calon tenaga pengajar yang memang sudah diseleksi dan sudah dipertimbangkan oleh lembaga guna mendapatkan calon tenaga pengajar yang profesional. Sedangkan penempatan calon tenaga pengajar harus disesuaikan dengan bidang keahliannya masing-masing agar pelaksanaan tujuan pendidikan dapat dicapai secara efektif.

d. Pembinaan

Fungsi pembinaan administrasi madrasah ialah untuk membina tenaga pengajar agar dapat meningkatkan kompetensi, peningkatan moral, disiplin kerja, melalui pendidikan dan pelatihan. Pembinaan harus dilakukan terus menerus sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman.

e. Kesejahteraan

Fungsi kesejahteraan administrasi ialah untuk meningkatkan prestasi kerja dengan memberikan motivasi dan kepuasan kerja melalui kompensasi. Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima para tenaga pengajar sebagai balasan jasa untuk kerja mereka. Kesejahteraan tidak harus berupa materi semata-melainkan juga pujian-pujian atas prestasi yang diraih oleh tenaga pengajar atau personil.

f. Penilaian atau Evaluasi

Fungsi penilaian atau evaluasi administrasi ialah sebagai control terhadap pelaksanaan yang sudah dijalankan sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya. Untuk itu pelaksanaan evaluasi atau penilaian dapat berjalan secara efektif bila pelaksanaannya berjalan dengan baik. Penilaian ini dilakukan dalam rangka mengukur dan menilai kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan dalam pelaksanaan administrasi maupun pembelajaran yang dilakukan oleh orang-orang yang bersangkutan apakah sudah sesuai dengan tujuan yang diharapkan atau belum dan untuk mengetahui apakah kegiatan-kegiatannya sudah berjalan efektif atau belum.

g. Pemutusan Hubungan kerja

Fungsi pemutusan hubungan kerja administrasi ialah untuk mempertegas atau memperjelas keterikatan masa kerja yang sudah tidak ada. Hal ini misalnya adanya surat SK (surat keterangan) pensiun bahwa masa kerja di lembaga tersebut sudah selesai oleh

sebab itu pelaksanaan pemutusan hubungan kerja dilakukan akhirselesai masa kerja.¹⁶ Pemutusan hubungan kerja ini dilakukan ketika pendidik ataupun tenaga kependidikan sudah pension dan tidak sanggup melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan manajemen di lembaga madrasah.

B. Madrasah

1. Pengertian Madrasah

Pengertian madrasah berasal dari bahasa Arab sebagai keterangan tempat (*dzaraf*), dari akar kata: “*darasa*”. Mempunyai arti “Tempat belajar para pelajar” atau diartikan “jalan” (*thariq*), sedangkan kata “*midras*” diartikan “buku yang dipelajari” atau “tempat belajar” dan kata “*midras*” dengan alif panjang diartikan “rumah untuk mempelajari kitab Taurat”. Padanan madrasah dalam bahasa Indonesia adalah sekolah.¹⁷ Pada umumnya, pemakaian kata madrasah dalam arti sekolah tersebut, mempunyai konotasi khusus yaitu sekolah-sekolah agama Islam yang berjenjang dari madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah, dan Aliyah. Sedangkan cikal bakal model madrasah di Indonesia adalah madrasah Nizhamiyah. Madrasah tumbuh dengan cikal bakalnya juga tidak terlepas dari adanya pondok-pondok pesantren yang ada di Indonesia. Lembaga pendidikan madrasah menjadi salah satu tempat pendidikan yang menyediakan terhadap peserta didiknya tidak hanya pembelajaran umum saja tetapi pelajaran-pelajaran Islam mulai dari sejarah, pengetahuan dan lain sebagainya.

Pengertian di atas maka jelaslah bahwa madrasah adalah wadah atau tempat belajar ilmu-ilmu keislaman dan ilmu pengetahuan keahlian lainnya yang berkembang pada zamannya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa istilah madrasah bersumber dari Islam itu

¹⁶H. Engkoswara dan Hj. Aan Komariah, *Administrasi Pendidikan*, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm. 254-255.

¹⁷ Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Hidakarya Agung, Jakarta, 1996, hlm. 30-31.

sendiri. Madrasah yang dikhususkan untuk mendalami ilmu-ilmu agama biasanya disebut dengan madrasah Diniyah. Sedangkan madrasah atau sekolah yang didalamnya diajarkan pula ilmu-ilmu umum, maka penyelenggaraannya mengikuti pola yang telah ditentukan Departemen Agama atau Departemen Pendidikan Nasional.

Madrasah atau sekolah ini dilengkapi dengan sarana dan prasarana sebagaimana lazimnya pendidikan sistem sekolah seperti perpustakaan, laboratorium, lapangan, olahraga dan lainnya.¹⁸ Madrasah menjadi sarana dan prasarana dalam mencari ilmu yang bersifat umum dan juga yang berlandaskan agama Islam. Eksistensi madrasah sekarang ini sudah luas sampai ke dalam daerah-daerah terpencil seperti halnya di daerah pati selatan khususnya di kecamatan Pucakwangi terdapat tiga Madrasah Aliyah, 8 Madrasah Tsanawiyah, dan 16 Madrasah Ibtidaiyah dan masih banyak lain yang terdapat di daerah Pati.

2. Eksistensi Madrasah

Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam di Indonesia relatif lebih muda dibanding pesantren. Madrasah lahir pada abad 20 dengan munculnya Madrasah Manba'ul Ulum Kerajaan Surakarta tahun 1905 dan Sekolah Adabiyah yang didirikan oleh Syekh Abdullah Ahmad di Sumatera Barat tahun 1909 (Malik Fadjar, 1998). Madrasah berdiri atas inisiatif dan realisasi dari pembaharuan sistem pendidikan Islam yang telah ada. Pembaharuan tersebut, menurut Karl Sternbrink (1986), meliputi tiga hal, yaitu: 1. Usaha menyempumakan sistem pendidikan pesantren, 2. Penyesuaian dengan sistem pendidikan Barat, dan, 3. Upaya menjembatani antara sistem pendidikan tradisional pesantren dan sistem pendidikan Barat.¹⁹

Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam kini ditempatkan sebagai pendidikan sekolah dalam sistem pendidikan nasional. Munculnya

¹⁸Ditjapontren Ditjen Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Pola Pembelajaran di Pesantren*, Jakarta, 2003, hlm. 11.

¹⁹Ismail, Nurul Huda, Abdu Kholiq, *Dinamika Pesantren dan Madrasah*, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta, 2002, hlm. 50-51.

SKB tiga menteri (Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri dalam Negeri) menandakan bahwa eksistensi madrasah sudah cukup kuat beriringan dengan sekolah umum. Di samping itu, munculnya SKB tiga menteri tersebut juga dinilai sebagai langkah positif bagi peningkatan mutu madrasah baik dari status, nilai ijazah maupun kurikulumnya (Malik Fadjar, 1998). Di dalam salah satu diktum pertimbangan SKB tersebut disebutkan perlunya diambil langkah-langkah untuk meningkatkan mutu pendidikan pada madrasah agar lulusan dari madrasah dapat melanjutkan atau pindah ke sekolah-sekolah umum dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi.

3. Masalah dalam Perkembangan Madrasah

Sebagai upaya inovasi dalam Sistem Pendidikan Islam, madrasah tidak lepas dari berbagai problema yang dihadapi. Problema-problema tersebut, menurut Darmu'in (1998), antara lain:

- a. Madrasah telah kehilangan akar sejarahnya, artinya keberadaan madrasah bukan merupakan kelanjutan pesantren, meskipun diakui bahwa pesantren merupakan bentuk lembaga pendidikan Islam pertama di Indonesia.
- b. Terdapat dualisme pemaknaan terhadap madrasah. Di satu sisi, madrasah diidentikkan dengan sekolah karena memiliki muatan secara kurikulum yang relatif sama dengan sekolah umum. Di sisi lain, madrasah dianggap sebagai pesantren dengan sistem klasikal yang kemudian dikenal dengan madrasah diniyah.²⁰

Dengan demikian, sebagai sub sistem pendidikan nasional, madrasah belum memiliki jati diri yang dapat dibedakan dari lembaga pendidikan lainnya. Efek pensejajaran madrasah dengan sekolah umum yang berakibat berkurangnya proporsi pendidikan agama dari 60% agama dan 40% umum menjadi 30% agama dan 70% umum dirasa sebagai tantangan yang melemahkan eksistensi pendidikan Islam. Beberapa

²⁰Ahmad BeniSaebani, Hasan Basri, *Ilmu Pendidikan Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2010, hlm. 23.

permasalahan yang muncul kemudian, antara lain:

- a. Berkurangnya muatan materi pendidikan agama. Hal ini dilihat sebagai upaya pendangkalan pemahaman agama, karena muatan kurikulum agama sebelum SKB dirasa belum mampu mencetak muslim sejati, apalagi kemudian dikurangi.
- b. Tamatan Madrasah serba tanggung. Pengetahuan agamanya tidak mendalam sedangkan pengetahuan umumnya juga rendah.²¹

Diakui bahwa model pendidikan madrasah di dalam perundang-undangan negara, memunculkan dualisme sistem Pendidikan di Indonesia. Dualisme pendidikan di Indonesia telah menjadi dilema yang belum dapat diselesaikan hingga sekarang. Dualisme ini tidak hanya berkenaan dengan sistem pengajarannya tetapi juga menjurus pada keilmuannya.²² Pola pikir yang sempit cenderung membuka gap antara ilmu-ilmu agama Islam dan ilmu-ilmu umum. Seakan-akan muncul ilmu Islam dan ilmu bukan Islam (kafir). Padahal dikhotomi keilmuan ini justru menjadi garapan bagi para pakar pendidikan Islam untuk berusaha menyatukan keduanya.

Dualisme pendidikan Islam juga muncul dalam bidang manajerialnya, khususnya di lembaga swasta. Lembaga swasta umumnya memiliki dua top manager yaitu kepala madrasah dan ketua yayasan (atau pengurus). Meskipun telah ada garis kewenangan yang memisahkan kedua top manager tersebut, yakni kepala madrasah memegang kendali akademik sedangkan ketua yayasan (pengurus) membidangi penyediaan sarana dan prasarana, sering di dalam praktik terjadi overlapping. Masalah ini biasanya lebih buruk jika di antara pengurus yayasan tersebut ada yang menjadi staf pengajar. Di samping ada kesan mematai-matai kepemimpinan kepala madrasah, juga ketika staf pengajar tersebut melakukan tindakan indisipliner (sering datang terlambat), kepala madrasah merasa tidak berdaya menegurnya.

²¹*Ibid.*, hlm. 26.

²²Abuddin Nata, *Sejarah Pendidikan Islam pada Periode Klasik dan Pertengahan*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2004, hlm. 45.

Praktek manajemen di madrasah sering menunjukkan model manajemen tradisional, yakni model manajemen paternalistik atau feodalistik. Dominasi senioritas semacam ini terkadang mengganggu perkembangan dan peningkatan kualitas pendidikan. Munculnya kreativitas inovatif dari kalangan muda terkadang dipahami sebagai sikap yang tidak menghargai senior. Kondisi yang demikian ini mengarah pada ujung ekstrem negatif, hingga muncul kesan bahwa meluruskan langkah atau mengoreksi kekeliruan langkah senior dianggap tabiat su'ul adab.

Dualisme pengelolaan pendidikan juga terjadi pada pembinaan yang dilakukan oleh departemen yaitu Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) dan Departemen Agama (Depag). Pembinaan Madrasah di bawah naungan Depag berhadapan dengan Sekolah umum di bawah pembinaan Depdiknas sering menimbulkan kecemburuan sejak di tingkat (SD dan MI) hingga perguruan tinggi. Dari alokasi dana, perhatian, pembinaan manajerial, bantuan buku dan media pembelajaran, serta penempatan guru, hingga pemberian beasiswa pendidikan lanjut sering tidak sama antara yang diterima oleh sekolah umum (Depdiknas) dengan madrasah (Depag).²³

Kesenjangan antara madrasah swasta dan madrasah negeri pun tampaknya juga menjadi masalah yang belum tuntas diselesaikan. Kesenjangan tersebut meliputi beberapa hal seperti pandangan guru, sarana dan prasarana, kualitas input siswa dan sebagainya yang kesemuanya itu berpengaruh baik langsung maupun tidak langsung kepada mutu pendidikan. Demikian ini karena munculnya SKB tiga menteri tersebut belum diimbangi penyediaan guru, buku-buku dan peralatan lain dari departemen terkait.²⁴ Hal seperti itu dapat diatasi dan diselesaikan kalau dalam pelaksanaan administrasi dalam pemenuhan sarana dan prasarana dapat dilakukan dengan efektif.

²³U. Saefullah, *Manajemen Pendidikan Islam*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm. 212-213.

²⁴*Ibid.*, hlm. 218.

4. Upaya Peningkatan Kualitas Madrasah

Munculnya kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi dalam bidang pendidikan yang bertujuan untuk memberi peluang kepada peserta didik untuk memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat, tidak mengagetkan para pengelola madrasah. Madrasah juga lebih survive dalam kondisi perubahan kurikulum yang sangat cepat, karena kehidupan madrasah tidak taklid kepada kurikulum nasional. Manajemen desentralisasi memberikan kewenangan kepada sekolah untuk melaksanakan PBM sesuai dengan kebutuhan yang dikondisikan untuk kebutuhan lokal. Dengan demikian, maka madrasah mendapatkan angin segar untuk bisa lebih exist dalam mengatur kegiatannya tanpa intervensi pemerintah pusat dalam upaya mencapai peningkatan mutu pendidikannya. Melalui proses belajar mengajar yang didasari dengan kebutuhan lokal, kurikulum tidak terbebani dengan materi lain yang sesungguhnya belum atau bahkan tidak relevan bagi peningkatan pengetahuan dan keterampilan peserta didik pada jenjang tersebut. Efektivitas proses belajar mengajar diharapkan bisa tercapai sehingga menghasilkan prestasi belajar yang lebih tinggi.²⁵

Adapun meningkatnya keterlibatan pemerintah dalam pendidikan menyebabkan para pengelola madrasah memfokuskan pada program-program tambahan sebagai sarana meningkatkan kualitas pendidikan. Program remedial dan kursus untuk meningkatkan perkembangan kognitif, sosial dan emosional dari siswa yang berkemampuan rendah dalam taraf perekonomian dan hasil belajar merupakan program-program kompensasi, bukan untuk menggantikan program-program yang ada.

Sebagai lembaga pendidikan yang lahir dari masyarakat, madrasah lebih mudah mengintegrasikan lingkungan eksternal ke dalam organisasi pendidikan, sehingga dapat menciptakan suasana kebersamaan dan kepemilikan yang tinggi dengan keterlibatan yang tinggi dari

²⁵Ismail, Nurul Huda, Abdu Kholiq, *Op. Cit.*, hlm. 54.

masyarakat.²⁶ Keterlibatan masyarakat bukan lagi terbatas seperti peranan orang tua siswa seperti Peranan Orang Tua Murid dan Guru (POMG) yang hanya melibatkan diri di tempat anaknya sekolah. Melainkan keterlibatan yang didasarkan kepada kepemilikan lingkungan.

Sesuai dengan jiwa desentralisasi yang menyerap aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan, masyarakat dituntut untuk memiliki kepedulian yang tinggi memperhatikan lembaga pendidikan yang berada di lingkungan setempat. Hal ini dapat menumbuhkan sikap kepemilikan yang tinggi dengan memberikan kontribusi baik dalam bidang material, kontrol manajemen, pembinaan, serta bentuk partisipasi lain dalam rangka meningkatkan eksistensi madrasah yang selanjutnya menjadi kebanggaan lingkungan setempat.

Akhirnya madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam yang hidup dari, oleh dan untuk masyarakat belum mendapatkan sentuhan pikiran dan tangan kita semua. Peningkatan mutu tidak akan terealisasi tanpa andil semua pihak. Untuk itu, demi peningkatan mutunya maka madrasah perlu dibantu, dibela dan diperjuangkan.²⁷ Peningkatan mutu tidak hanya dijalankan oleh kepala sekolah saja melainkan harus semua pendidik dan tenaga kependidikan yang ikut juga melaksanakan kegiatan administrasi dalam rangka peningkatan mutu madrasah dan hasil output dari madrasah tersebut. Kepala madrasah bertindak sebagai supervisor dalam peningkatan mutu di madrasah dengan melakukan beberapa kegiatan seperti melakukan perencanaan kegiatan dan evaluasi kegiatan.

Seiring dengan hadirnya Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, secara lebih rinci aspek-aspek yang dapat dikembangkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan tersebut sehingga dalam penyelenggaraan efisiensi, relevan, berkualitas dan memenuh pemerataan dalam melaksanakan pengelolaan bidang

²⁶Mahmud Yunus, *Op. Cit.*, hlm. 35.

²⁷*Ibid.*, hlm. 37.

administrasi madrasah harus memenuhi standar-standar sebagai berikut: a) pengembangan standar isi (kurikulum), b) pengembangan standar proses pendidikan. c) pengembangan standar kompetensi lulusan, d) pengembangan standar pendidik dan tenaga kependidikan, e) pengembangan standar sarana dan prasarana pendidikan, f) pengembangan standar pengelolaan pendidikan, g) pengembangan standar pembiayaan pendidikan, h) pengembangan standar penilaian pendidikan.

Aspek-aspek upaya yang harus dilakukan oleh madrasah dalam mengatasi adanya probelmatika hal yang harus dikembangkan ialah sesuai dengan dalam perencanaan sekolah dengan mengacu pada delapan standar nasional pendidikan (PP nomor 19 tahun 2005) dimana setiap sekolah ataupun madrasah yang sudah mengikuti peraturan secara operasional dari pemerintah.²⁸ Dimana setiap madrasah harus menjalankan kegiatan Rencana Pengembangan Sekolah (RPS) atau madrasah dalam mengatasi problematika adminitrasi madrasah hal yang harus dilakukan diantaranya: 1) pemerataan keslimaan: persamaan keslimaan, akses dan keadilan atau kewajaran, 2) peningkatan kualitas: kualitas pendidikan madrasah yang meliputi input, proses dan output, dengan catatan bahwa output sangat ditentukan oleh proses dan proses sangat dipengaruhi oleh tingkat kesiapan input, 3) peningkatan efisiensi yang merujuk pada hasil yang maksimal dengan biaya yang wajar, 4) peningkatan relevansi yang merujuk pada kesesuaian hasil pendidikan denga kebutuhan (*needs*) baik kebutuhan peserta didik, kebutuhan keluarga dan kebutuhan pembangunan yang meliputi berbagi sector, dan 5) pengembangan kapasitas yaitu upaya-upaya yang dilakukan secara sistematis untuk menyiapkan kapasitas sumberdaya madrasah, pengembangan kelembagaan, penegmbangan manajemen dan sistem madrasah agar mampu dan sanggup menjalankan tugas dan fungsinya dalam kerangka untuk menghasilkan output yang diharapkan serta menghasilkan pola

²⁸ Junaidi, *Desain Pengembangan Mutu Madrasah (Konsep Rancangan Pengembangan Sekolah (RPS))*, Teras, Yogyakarta, 2011, hlm18-20.

pengelolaan madrasah yang “*good governance*” dan akuntabel.²⁹

C. Hasil Penelitian Terdahulu

Patut digaris bawahi hasil kajian pustaka ini secara sadar, penulis mengakui betapa banyak mahasiswa Fakultas Tarbiyah yang telah melakukan kajian tentang berbagai hal yang berkaitan dengan administrasi pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI). Namun demikian skripsi yang sedang penulis kaji ini sangat berbeda dengan skripsi-skripsi yang telah ada. Karena pada skripsi ini terfokus pada problematika pelaksanaan administrasi madrasah di MA Nurul Qur'an Tegalwero Pucakwangi Pati Tahun 2015/2016.

Adapun kajian pustaka tersebut peneliti telah memperoleh satu judul yang telah ada, walaupun mempunyai kesamaan tema, tetapi jauh berbeda dalam titik fokus pembahasannya. Jadi, apa yang sedang penulis teliti merupakan hal yang baru yang jauh dari upaya penjiplakan skripsi yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini antara lain skripsi yang berjudul :

Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Skripsi	Tempat Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Sri Handari salah satu mahasiswa jurusan tarbiyah prodi Pendidikan Agama Islam STAIN KUDUS Tahun Pelajaran 2012/2013	Studi tentang pelaksanaan administrasi kurikulum	MI Tsamrotul Huda Terjo Dawe Kudus	Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa pelaksanaan administrasi kurikulum dalam meningkatkan profesionalitas di Sekolah atau madrasah tersebut adalah merupakan suatu pemenuhan

²⁹ Junaidi, *Op. Cit*, hlm. 20.

				pelaksanaan administratif dan manajemen dalam rangka meningkatkan profesionalitas guru yang sangat berperan sekali sebagai alat untuk mencapai prestasi siswa dalam pembelajaran.
2	Buklis Agraeni salah satu Mahasiswi Jurusan Pendidikan Islam Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	Pelaksanaan Administrasi Guru Dalam Menunjang Keberhasilan Pembelajaran	SMK Al-Amanah Cisauk Tangerang Banten	Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa pelaksanaan administrasi guru dalam meningkatkan profesionalitas di Sekolah tersebut adalah merupakan suatu pemenuhan pelaksanaan administratif dan manajemen dalam rangka meningkatkan profesionalitas guru yang sangat berperan sekali sebagai alat untuk mencapai prestasi siswa dalam pembelajaran.

Karya ilmiah diatas bebrbeda dengan yang saya tulis karena dalam penulisan saya terkait problermatika pelaksanaan administrasi di madrasah yang studi kasusnya di MA Nurul Qur'an Tegalwero Pucakwangi Pati. Sedangkan dua karya ilmiah diatas terkait dengan pelaksanaan administrasi kurikulum sekolah dalam meningkatkan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah maupun di madrasah.

D. Kerangka Berpikir

Dunia pendidikan di Indonesia, bidang studi administrasi pendidikan boleh dikatakan masih baru. Di negara-negara yang sudah maju, administrasi pendidikan mulai berkembang dengan pesat sejak pertengahan pertama abad ke-20, terutama sejak berakhirnya perang dunia kedua. Khususnya di negara kita, Indonesia administrasi pendidikan baru diperkenalkan melalui beberapa bidang-bidang tertentu.

Tidak mengherankan jika para pendidik dan tenaga kependidikan sendiri banyak yang belum dapat memahami betapa perlu dan pentingnya administrasi pendidikan pada umumnya. Di samping itu, administrasi pendidikan itu sendiri sebagai ilmu, terus mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan di negara masing-masing. Dalam dunia pendidikan diperlukan adanya pelaksanaan tata administrasi yang baik dan teratur. Administrasi pendidikan dalam sekolah memang harus ditetapkan dan dijalankan semaksimal mungkin dalam bidang akademik dan penunjang administrasi lainnya yang ada di sekolah atau madrasah. Mengingat betapa pentingnya pelaksanaan administrasi di sekolah atau madrasah dalam rangka untuk menunjang keberhasilan dalam implementasi administrasi madrasah atau sekolah. Administrasi menjadi induk dari keberhasilan dari tujuan pelaksanaan manajemen sekolah atau madrasah di samping itu juga harus dijadikan oleh pendidik dan tenaga pendidikan yang memenuhi sumber daya manusia yang baik dan profesional.

Sejauh ini pendidikan yang ada di Indonesia khususnya di MA Nurul Qur'an Tegalwero Pucakwangi masih belum bisa penataan administrasi

dengan baik dan sempurna sehingga masih timbul problem-problem dalam pelaksanaan administrasi di sekolah atau madrasah. Khususnya problematika pelaksanaan administrasi di madrasah ini masih banyak problem-problem dalam rangka penataan manajemen administrasi yang bermutu. Sudah menjadi kebiasaan dan adat bagi pendidik dan tenaga kependidikan di madrasah atau sekolah hanya mempersiapkan dan mengatur administrasi yang baik dan teratur ketika akan ada monitoring dan verifikasi dari badan Akreditasi Nasional. Sehingga pelaksanaan administrasi ini tidak berjalan secara kontinuitas dalam kesehariannya.

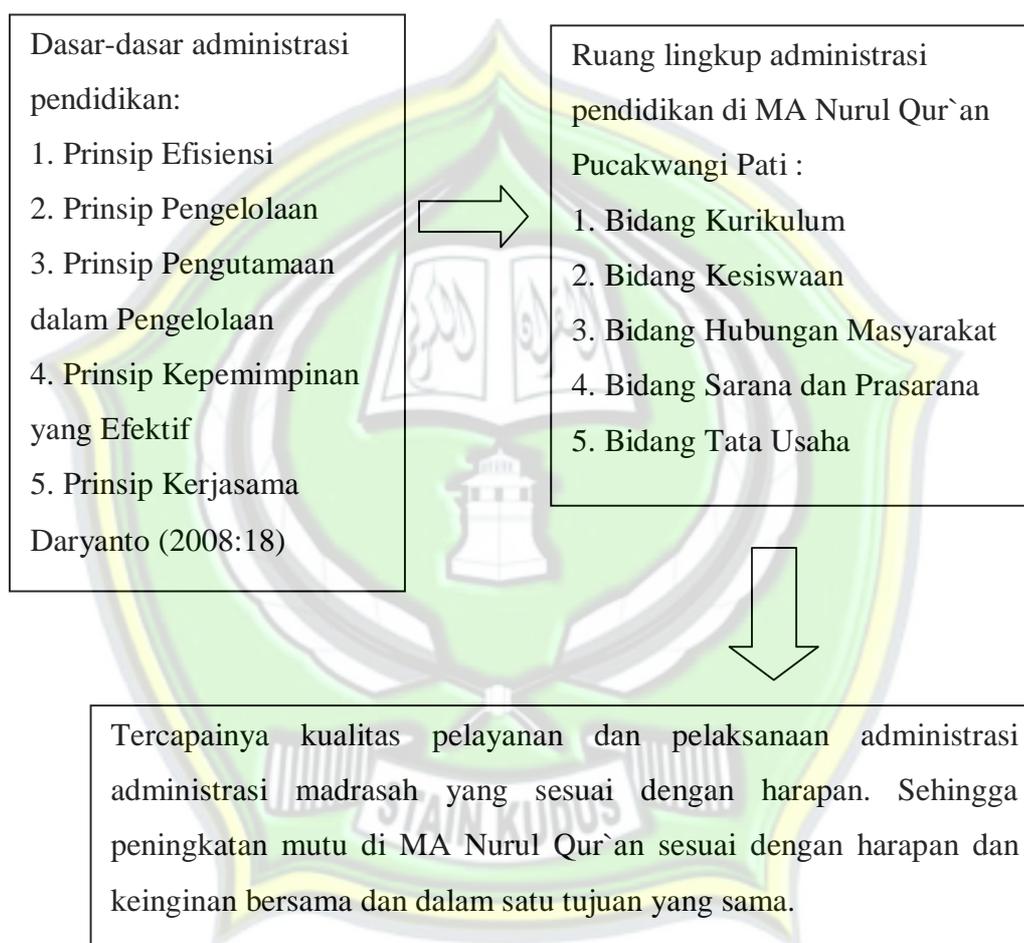
Kegiatan pelaksanaan administrasi ini sangat diperlukan oleh semua orang khususnya bagi pendidik dan tenaga kependidikan dalam rangka meningkatkan profesionalitas dalam merencanakan pembelajaran dan pengaturan dalam tata administrasi di madrasah atau sekolah. Maka sangat penting sekali pelaksanaan administrasi di madrasah atau sekolah untuk menghasilkan langkah-langkah yang efektif dan efisien dalam meningkatkan manajemen sekolah.

Menyadari begitu penting dan sangat berguna administrasi bagi pendidik dan tenaga kependidikan, maka administrasi dalam meningkatkan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan maka harus senantiasa ditingkatkan dan dikembangkan di dalam lembaga-lembaga madrasah atau sekolah sehingga di lingkungan tersebut tidak asing lagi dalam melaksanakan administrasi dalam rangka untuk mencapai tujuan daripada pendidikan. Sehingga dalam penelitian ini peneliti melihat dari sebagian pelaksanaan administrasi di sekolah atau madrasah masih perlu adanya pembenahan-pembenahan dalam pelaksanaan administrasi. Sehingga diperlukan sumber daya pendidik dan tenaga kependidikan yang profesionalitas dan memiliki kemampuan-kemampuan yang relevan.

Melihat dari berbagai problem-problem dalam pelaksanaan administrasi di MA Nurul Qur'an Tegalwero Pucakwangi Pati peneliti akan sedikit banyak membahas masalah yang berkaitan dengan apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan administrasi di sekolah atau madrasah ini dan upaya apa

yang akan dilakukan dalam rangka pembenahan masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan administrasi sehingga nanti manajemen sekolah atau madrasah dapat berjalan sesuai dengan rencana awal yang menjadi harapan.

Bagan 2. 1
Kerangka Berfikir



Administrasi pendidikan sangatlah penting dalam dunia pendidikan. Tanpa adanya administrasi, suatu perencanaan besar atau kecil tidak akan berjalan dengan lancar. Administrasi pendidikan mempelajari segala cara-cara pengaturan dan penyelenggaraan yang efektif dan efisien agar tercapai hasil yang maksimal. Segala sumber daya yang digunakan akan diatur penggunaannya, sehingga tidak terjadi pemborosan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan bersama.